

Pencegahan Dan Penanggulangan Banjir Di Kota Pekalongan Masa Pemerintahan Afzan Arslan Djunaidi Periode 2021-2024

Muhammad Reynaldi Eka Saputra *) , Nur Hidayat Sardini **)

Email : reykabuncit@gmail.com, nhsardini@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pencegahan dan penanggulangan banjir di Kota Pekalongan, kota Pekalongan setiap tahun mengalami banjir yang selain karena aspek geografi juga persoalan pengelolaan kota yang tidak dapat menyelesaikan keadaan tersebut. Melalui penelitian ini peneliti bermaksud untuk meneliti lebih jauh bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh Afzan Arslan Djunaidi Walikota Pekalongan 2021-2024. Dalam penelitian ini bermaksud untuk menjawab: (1). Mengapa Kota Pekalongan selalu banjir? (2). Bagaimana kebijakan penanganan dan penanggulangan banjir di Kota Pekalongan masa pemerintahan Afzan Arslan Djunaidi?

Dalam mengkaji permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, dalam mendapatkan data penelitian dilakukan juga wawancara sumber dengan metode purposive sampling diantaranya para pemerintah setempat dan tokoh agama dan masyarakat, selain itu peneliti juga menggunakan metode snowball sampling. Dari wawancara yang dilakukan dengan satu pihak maka untuk mendapatkan data yang komprehensif peneliti melanjutkan wawancara dengan yang lain. Selanjutnya analisa data dengan cara verifikasi atas data tersebut, kemudian peneliti melakukan pengujian terhadap data dari berbagai sumber dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk mendapatkan data yang kredibel.

Dari penelitian yang dilakukan upaya pemerintah pekalongan yaitu dengan membangun sumur resapan di beberapa lokasi banjir yang ada di pekalongan. Dalam kurung waktu 3 tahun Walikota Pekalongan Afzan Arslan telah membangun lebih dari 250 sumur resapan. Namun karena banjir ini telah terjadi bertahun-tahun sehingga banjir tetap masih terus terjadi, bencana banjir parah terakhir terjadi pada 5 Maret 2024. Dalam banjir tersebut bersama dengan BPBD Kota Pekalongan Pemerintah dengan sigap melakukan bantuan terhadap korban banjir dengan mendirikan tenda pengungsian dan bantuan sandang dan pangan untuk dapat menjaga warganya. Dalam kesempatan itu pula pemerintah pekalongan memberikan edukasi mengenai pentingnya pencegahan dan gotong royong dalam penanganan banjir.

Kata Kunci: Pencegahan, Penanggulangan, Sumur Resapan, Edukasi, Bantuan.

Flood Prevention and Mitigation in Pekalongan City during Afzan Arslan Djunaidi's Government Period 2021-2024

Muhammad Reynaldi Eka Saputra *), Nur Hidayat Sardini **)

Email : reykabuncit@gmail.com, nhsardini@gmail.com

Department of Politics and Government
Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research examines the prevention and control of flooding in Pekalongan City, Pekalongan city experiences flooding every year, which is not only due to geographical aspects but also city management issues that cannot resolve the situation. Through this research, the researcher intends to further examine how the prevention carried out by Afzan Arslan Djunaidi, Mayor of Pekalongan 2021-2024. This research intends to answer: (1). Why is Pekalongan City always flooded? (2). How is the policy of flood management and prevention in Pekalongan City during the reign of Afzan Arslan Djunaidi?

Dalam mengkaji permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, dalam mendapatkan data penelitian dilakukan juga wawancara sumber dengan metode purposive sampling diantaranya para pemerintah setempat dan tokoh agama dan masyarakat, selain itu peneliti juga menggunakan metode snowball sampling. Dari wawancara yang dilakukan dengan satu pihak maka untuk mendapatkan data yang komprehensif peneliti melanjutkan wawancara dengan yang lain. Selanjutnya analisa data dengan cara verifikasi atas data tersebut, kemudian peneliti melakukan pengujian terhadap data dari berbagai sumber dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk mendapatkan data yang kredibel.

From the research conducted, the Pekalongan government's effort is to build infiltration wells in several flood locations in Pekalongan. Within 3 years Pekalongan Mayor Afzan Arslan had built more than 250 infiltration wells. However, because this flooding has occurred for many years, flooding continues to occur, the last severe flood disaster occurred on 5 March 2024. In the flood, together with the Pekalongan City BPBD, the government swiftly provided assistance to flood victims by setting up refugee tents and providing clothing and food assistance to be able to maintain its citizens. On that occasion, the Pekalongan government also provided education on the importance of prevention and mutual cooperation in handling floods.

Keywords: *Prevention, Management, Infiltration Wells, Education, Assistance*

*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

***) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

A. PENDAHULUAN

Pekalongan merupakan salah satu kota di daerah pesisir utara di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan laut Jawa. Seperti kebanyakan daerah pesisir utara, Pekalongan tidak luput dari permasalahan banjir rob. Penyebabnya adalah kenaikan muka air laut (*Sea Level Rise*), penurunan tanah (*land subsidence*) dan tentu saja pemanasan global (*global warming*). Adanya banjir rob ini tentu sangat merugikan aktifitas manusia dan merusak berbagai infrastruktur pemukiman, industri, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Banjir rob adalah banjir yang diakibatkan oleh pasangnya air laut, hingga air yang pasang tersebut menggenangi daratan. Banjir rob ini juga dikenal sebagai banjir genangan. Banjir rob ini akan sering melanda atau sering terjadi di daerah yang permukaannya lebih rendah daripada permukaan air laut. Karena disebabkan oleh meluapnya air laut yang sampai ke daratan, maka air yang menggenangi karena banjir rob ini mempunyai warna yang cenderung lebih jernih daripada air yang pada banjir-banjir biasanya.

Melihat aktivitas rob yang kian hari semakin mengancam kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat menuntut agar penanganan rob ini segera diatasi. Pemerintah kota sebagai penanggung jawab dalam penanganan rob dalam hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Pekalongan Tahun 2007-2027 pasal 3 (c). Penanganan rob ini tidak bisa ditangani jika hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, tetapi membutuhkan peran serta berbagai pihak atau stakeholders yang secara bersama-sama melakukannya. Adapun stakeholders dalam penanganan rob di Kota Pekalongan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekalongan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Pekalongan.

Bagi Kota Pekalongan, banjir rob ini bukanlah masalah yang baru bagi khususnya di bagian wilayah Pekalongan Barat, dan saat ini lokasi paling parah terlanda banjir di Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Barat. Berdasarkan penelitian sebelumnya

bahwa adanya kenaikan muka air laut dan adanya penurunan muka tanah yang menyebabkan Kota Pekalongan menjadi salah satu daerah yang rentan terkena genangan rob. Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai tertinggi sebagai kota percontohan RAN-API. “Kota Pekalongan menjadi wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim dalam RAN-API (banjir, air bersih, rob, dan sanitasi).

Dalam penanganannya, jika pihak Pemerintah Kota Pekalongan tidak memiliki penanganan yang signifikan maka akan mendorong timbulnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh itu sendiri akan semakin besar dan meluas ke wilayah lain dikarenakan air laut yang setiap tahun semakin naik ke wilayah daratan akan menyebabkan banjir rob yang berasal dari bibir pantai. Untuk itu Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan kebijakan penanggulangan banjir rob sebagai salah satu prioritas utama pembangunan Kota Pekalongan

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini yaitu ;

Mengapa Kota Pekalongan selalu banjir?; dan Bagaimana kebijakan penanganan dan penanggulangan banjir di Kota Pekalongan masa pemerintahan Afzan Arslan Djunaidi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini yaitu; Untuk mengetahui alasan mengapa Kota Pekalongan; dan Untuk menganalisis kebijakan penanganan dan penanggulangan banjir pemerintah Kota Pekalongan masa pemerintahan Afzan Arslan Djunaidi.

D. KERANGKA TEORI

4.1 Banjir

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (*runoff*) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai.

Selain itu, terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi

tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain. (Raditya Jati dkk, 2016)

4.2 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Banjir

Penanggulangan bencana menurut UU RI No. 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi. (Sang Gede Purnama, 2017)

4.2.1 Pencegahan Bencana Banjir :

- Kesiagaan
- Peringatan Dini
- Mitigasi

4.2.2 Penanggulangan Bencana Banjir : (Omar Shalih, 2021)

- Tanggap Darurat
- Rehabilitasi
- Rekonstruksi

4.3 Peran Kepala Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Banjir

Dalam menghadapi banjir daerah, kepemimpinan seorang Kepala Daerah dituntut untuk memiliki pemikiran yang visioner, salah satunya adalah memiliki pola pikir yang inovatif dan kreatif. Inovasi dan kreativitas Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan yang akan diimplementasikan dalam program kerja akan berdampak langsung kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kepemimpinan berkaitan dengan kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu diperlukan seorang pemimpin yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Sehingga dapat menginspirasi pemimpin lainnya menuju masa depan yang lebih baik. (Rahmadhoni & Fitriyah, 2021)

E. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian ilmiah dengan tujuan untuk mengkaji mengenai permasalahan sosial dalam masyarakat. (Seto Mulyani dkk, 2019) Untuk mendapatkan data primer penelitian

akan dilakukan di daerah sekitar pesisir Kota Pekalongan, lalu untuk data yang lebih rinci akan dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Dan Pencegahan Banjir (BPBD) Kota Pekalongan dimana nanti dapat menemukan informasi tentang kebijakan-kebijakan tentang penanggulangan yang dilakukan di Pekalongan. Dan nantinya akan dilakukan juga di kantor pemerintahan kota Pekalongan dan provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi dan data. Kemudian untuk data sekunder (pendukung), peneliti memperoleh data dari dokumen, buku, jurnal, atau dari situs-situs internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang diperlukan oleh peneliti. (Suharsimi Arikunto, 2006)

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

7.1 Potensi Banjir Kota Pekalongan

Biasanya bencana banjir yang kerap terjadi di Kota Pekalongan ditimbulkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal saat musim penghujan datang, sebagai akibatnya sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai serta anak sungai alamiah dan sistem saluran drainase serta kanal

penampung banjir buatan yang ada tak cukup bisa menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap.

Ancaman banjir berpotensi terjadi sebab Kota Pekalongan mempunyai DAS yang beredar di seluruh wilayah Kota Pekalongan. DAS yang ada pada saat ini hampir sebagian besar tak bisa lagi menampung debit air sebagai akibatnya terjadi luapan air yang menggenangi daerah sepanjang sungai. Hal ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan curah hujan dampak dari perubahan iklim, adanya alih fungsi lahan hutan yang tak terkontrol dan pemanfaatan DAS sebagai kawasan budidaya. Berkurangnya daerah resapan serta daerah terbuka hijau pada kawasan permukiman/perkotaan turut pula berkontribusi menambah potensi ancaman banjir.

Permasalahan banjir masih menghantui warga Kota Pekalongan, bahkan setiap musim hujan terjadi hampir sebagian Kota Pekalongan tersebut tergenang air, terutama pada jalan-jalan protokol serta permukiman. Banjir dan genangan air pada sejumlah titik Kota Pekalongan masih

terus terjadi. Hasil analisis peta kemiringan lereng di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa kelas kemiringan lereng terbagi menjadi lima kelas memiliki luasan seluas 21.879,48 ha memiliki kemiringan lereng 0-8% dan seluas 4.217,97 ha memiliki kemiringan lereng > 45%.

Berdasarkan hasil pengolahan data luasan area menunjukkan bahwa sebagian besar atau mendominasi di Kota Pekalongan memiliki kemiringan lereng 0-8% masuk kategori datar atau rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada wilayah tersebut sangat berpotensi terjadi banjir karena pada wilayah yang datar menyebabkan air akan menjadi menggenangi. Sedangkan wilayah yang memiliki wilayah yang sangat curam berada pada bagian selatan lokasi studi yang morfologinya perbukitan dan pegunungan potensi akan terjadinya banjir semakin sedikit. Dalam hal ini, kemiringan lereng menjadi faktor utama penyebab terjadinya banjir. (Darmawan, 2017)

Pada wilayah pesisir Kota Pekalongan memiliki kategori kemiringan lereng 0-8% atau datar

yang ditunjukkan pada bagian pesisir atau bagian utara Kota Pekalongan yang menunjukkan pada daerah tersebut rawan akan terjadinya banjir rob, sedangkan untuk kategori kemiringan lereng > 45% atau sangat curam yang berada pada bagian selatan Kota Pekalongan yang menunjukkan pada daerah tersebut semakin aman akan terdampak banjir rob. Semakin landai kemiringan lereng pada suatu daerah maka semakin berpotensi pula terjadinya bencana banjir, begitupula sebaliknya semakin curam kemiringan lereng pesisirnya, maka semakin aman akan terkena banjir yang dapat menggenangi. (Darmawan, 2017)

7.2 Pencegahan dan Penanggulangan Banjir Pada Masa Pemerintahan Afzan Arslan Djunaidi Periode 2021-2024

Dalam kapasitasnya sebagai Walikota Pekalongan dari 2021 hingga 2024, Bapak Afzan Arslan dipuji karena menjadi pemimpin yang populer dan berpikiran adil yang mendapat dukungan dari penduduk setempat. Beliau mendapat kepercayaan dan dukungan yang tinggi dari masyarakat sebagai hasil dari upaya dan kontribusinya dalam

mengelola Kota Pekalongan selama menjabat sebagai Wakil Walikota periode 2019-2021. Analisis dilakukan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari data wawancara, serta studi pustaka dengan menggunakan berbagai dokumen pendukung.

Dalam upaya pencegahan banjir di Kota Pekalongan, pemerintahan Afzan Arslan dalam masa jabatan 2021-2024 mengagendakan berbagai upaya pencegahan baik yang secara langsung berdampak pada pencegahan maupun pencegahan yang bersifat jangka panjang, ada dua hal yang menjadi sorotan peneliti yaitu kebijakan politik sebagai program jangka panjang pencegahan banjir dan kebijakan sumur resapan yang dapat mencegah banjir secara langsung.

7.2.1 Kebijakan Sumur Resapan

Saat kampanyenya tahun 2019 silam, Afzan Arslan berjanji akan menangani permasalahan lingkungan di Kota Pekalongan sebagai penyebab utama banjir. Salah satu upaya yang dilakukan Afzan Arslan untuk mengatasi banjir membangun sumur resapan. Sumur resapan adalah rekayasa konservasi air berupa

bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai sumur galian dengan kedalaman tertentu. Sumur resapan akan menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah.

Dari hasil wawancara penulis dengan Wismo Adityo, Camat Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dapat diketahui bahwa berdasarkan pada temuan di lapangan, pembangunan sumur resapan dinilai tidak efektif dalam mengurangi jumlah banjir, sumur resapan atau drainase vertical yang dibangun untuk tujuan ini sering dikritik oleh berbagai organisasi.

Selain banyaknya keluhan tentang kontraktor yang mengerjakan proyek yang tidak disetujui dan sumur resapan, polemik lain juga muncul. Keadaan ini menyebabkan masalah baru, seperti rusaknya jalur lintas pejalan kaki sampai amblesnya penutup sumur resapan sehingga dapat membahayakan para pemakai jalan tersebut. Bahkan, Afzan Arslan mengatakan kondisi banjir di Kota Pekalongan yang menjadi sorotan selama sepekan terakhir. Menurut Afzan, banjir di Kota Pekalongan sekarang tidak

mengkhawatirkan. Seluruh genangan banjir diklaim bisa surut dalam waktu kurang dari 6 jam. Menurut Afzan, hal itu dikarenakan manajemen penanganan banjir telah berjalan baik.

Mengenai bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam hal penyediaan sumur resapan di Kota Pekalongan, maka akan dibahas beberapa indikator yaitu *input, proses, output, outcome, benefit* dan *impact*.

- **Output**

Dari hasil wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Pekalongan Utara, dapat diketahui bahwa pembangunan sumur resapan yang ada di Kota Pekalongan belum sepenuhnya mencapai target, dikarenakan terdapat peraturan putusan gubernur terbaru yang mewajibkan bahwa setiap perorangan badan hukum yang ingin mendirikan bangunan baru harus membuat sumur resapan. Wismo Adityo mengatakan bahwa pembangunan sumur resapan di Kota Pekalongan sebenarnya masih belum sesuai dengan target yang direncanakan. Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya instansi yang belum memiliki sumur resapan.

- **Outcome**

Dari hasil wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Pekalongan Utara, sampai sejauh ini *outcome* yang dirasakan hampir seluruh masyarakat merasakan langsung dampak dari pembangunan sumur resapan ini. Dimana saat terjadi hujan, genangan air yang ada di atas permukaan tanah dapat surut dalam jangka waktu yang pendek.

Dari wawancara tersebut juga dapat diketahui bahwa sumur resapan memiliki *outcome* yang sudah terpenuhi yakni sebagai alat meminimalisir tinggi genangan di atas permukaan tanah yang terjadi saat intensitas curah hujan yang tinggi dan surut dalam kurun waktu singkat. Sumur Resapan akan cukup efektif dalam menghilangkan genangan, menurut data dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Sumur Resapan dari Pemerintah Kota Pekalongan.

- **Benefit**

Berbagai macam upaya pemerintah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Mulai dari kerjasama antar Pemerintah Pemrov Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Pekalongan, penyelenggaraan sinergi

proyek SPAM yang salah satunya terletak di Hilir, Jatiluhur, pembangunan sumur resapan yang sudah tersebar luas di Kota Pekalongan yang digunakan sebagai cadangan air tanah, menyediakan suplai tambahan air oleh PAM Jaya dan penerbitan kebijakan pembatasan dan pelanggaran pengambilan air tanah di wilayah yang telah dilayahi jaringan PAM Jaya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zonasi Bebas Air Tanah yang direncanakan akan diberlakukan pada 1 Agustus 2023. Dengan adanya kerjasama antara Pemprov Jawa Tengah itu, Afzan Arslan menargetkan pada 2030 Kota Pekalongan 100% terlayani akses layanan air minum.

Pembuatan sumur resapan harus menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan di Kota Pekalongan. engan mengikutsertakan beberapa organisasi yang memiliki komitmen untuk memastikan proyek konstruksi memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, maka konstruksi di Sumur Resapan akan semakin kokoh dan berkualitas (*Sustainable Development Goals*).

7.2.2 Kebijakan Politik Penanggulangan Banjir

Dalam melaksanakan kebijakan politik untuk menanggulangi banjir, Kepala Daerah membutuhkan berbagai *stakeholders* untuk menjamin keberhasilan kebijakan. Para pihak yang terlibat untuk pengelolaan bencana meliputi unsur-unsur pemerintah (*enabler*), perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sukarelawan/ti (*volunteer*), swasta/ investor, kontraktor, konsultan, masyarakat dan lain-lain. (Edi Suharto, 2005)

Berdasarkan temuan lapangan, peneliti menemukan bahwa tanggap darurat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan melalui tahapan seperti mengkoordinir unit yang terlibat dalam kegiatan evakuasi korban bencana banjir. Pemerintah Pekalongan mengkoordinir seluruh unit yang terlibat penanggulangan bencana, khususnya evakuasi. Karena banyak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, terutama adalah BPBD adalah sebagai koordinator. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan juga melakukan penyelamatan manusia

(rescue) untuk menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin.

Bukan hanya BPBD Pekalongan yang pemerintah arahkan untuk melakukan tanggap darurat, tetapi masyarakat sekitar juga melakukan tanggap darurat. Menurut hasil wawancara dengan Widya Putri Nugroho, Lurah Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara, warga ikut berpartisipasi bahkan sebelum adanya bantuan datang warga sudah ikut mengevakuasi barang barang berharga nya dan turut membantu mengevakuasi korban banjir.

Dari wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan sudah melakukan beberapa tahapan yang ada di saat bencana. Namun pada temuan berikutnya ternyata Pemerintah Kota Pekalongan mengakui bahwa mereka tidak melakukan penyelamatan terhadap harta benda masyarakat, karena dirasakan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab individu atau pemilik. Sebagaimana yang diungkapkan pada wawancara berikut dimana hal tersebut tidak sesuai dengan tahapan yang ada di saat

bencana. masyarakat, karena dirasakan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab individu atau pemilik. Sebagaimana yang diungkapkan pada wawancara berikut dimana hal tersebut tidak sesuai dengan tahapan yang ada di saat bencana. Kemudian Pemerintah Kota Pekalongan melakukan perlindungan terhadap masyarakat umum dengan cara menyiapkan tempat pengungsian, kebutuhan pangan, dan pengobatan terhadap korban bencana banjir dengan cara mengkoordinir instansi terkait.

G. KESIMPULAN

Permasalahan banjir masih menghantui warga Kota Pekalongan, bahkan setiap musim hujan terjadi hampir sebagian Kota Pekalongan tersebut tergenang air, terutama pada jalan-jalan protokol serta pemukiman. Salah satu penyebab potensi banjir di Kota Pekalongan adalah tata ruang perkotaan dan struktur lahannya. Pengelolaan tata ruang perkotaan yang serampangan, penggunaan areal serapan air yang masif buat pemukiman, sampai perambahan hutan pada kawasan hulu sungai ditengarai menjadi penyebab melemahnya daya dukung

lingkungan saat terjadinya hujan deras.

Dalam upaya pencegahan banjir di Kota Pekalongan, pemerintahan Afzan Arslan dalam masa jabatan 2021-2024 mengagendakan berbagai upaya pencegahan yaitu dengan kebijakan advokasi yang menurut peneliti program jangka panjang pencegahan banjir dan Kebijakan sumur resapan yang dapat mencegah banjir secara langsung.

H. SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Pekalongan dengan judul penelitian “Penanggulangan Banjir Abadi Di Kota Pekalongan Masa Pemerintahan Afzan Arslan Djunaidi Periode 2021-2024”. Peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari hasil penelitian tersebut, dari penelitian ini analisa yang digunakan menggunakan analisa dari sudut pandang politik, bagi peneliti hal tersebut belum cukup. Diperlukan berbagai pendekatan untuk dapat menyelesaikan persolan banjir.
2. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan, sehingga peneliti terbuka dengan berbagai kritikan dari berbagai pihak, peneliti berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah khazanah pemahaman kebijakan public dalam menghadapi banjir yang setiap tahun melanda negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, K. dkk. Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Kabupaten Sampang Menggunakan Metode Overlay Dengan Scoringberbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, (2017). No. 6 (1), 278
- Mohd Rahmaddhoni Pratama & Fitriyah, Leadership Style Tri Rismaharini’s in overcoming Waste Management in Surabaya City, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 1, Agustus 2021: 181 - 189, DOI: 10.34007/jehss.v4i1.608
- Mulyadi, Seto, dkk, 2019, *Metodetode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, Depok: Raja Wali Pers.
- Osmar Shalih, Riant Nugroho, Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia, *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 2021
- Raditya Jati dkk, *Resiko Bencana di Indonesia*, Jakarta: BNPB, 2016
- Sang Gede Purnama, *Modul Manajemen Bencana*,

Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana Program
Studi Kesehatan Masyarakat,
2017

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur
Penelitian: Pendekatan
Praktis, Edisi Revisi VI*,
Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suharto, Edi, 2005, *Membangun
Masyarakat Memberdayakan
Rakyat*, Bandung:Refia
Aditama.